

PENERAPAN MODE HYBRID DALAM PROJECT-BASED LEARNING: STUDI PROFIL GAYA BELAJAR MAHASISWA CALON GURU FISIKA

Y. A. Wahyudin¹, Khairur Rizki², Kurnia Zulhandayani Rizki³, Alifa Shansia Ilham⁴,
Aulianov Ramadhani⁵

^{1, 2, 3, 4}Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Mataram

Alamat korespondensi : aria_wahyuddin@unram.ac.id

Abstrak: Penelitian ini mengkaji pemanfaatan teknologi digital dalam tata kelola migrasi di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), sebuah wilayah dengan tingkat migrasi tenaga kerja yang tinggi. Isu kompleks seperti perdagangan manusia dan eksploitasi tenaga kerja menuntut solusi inovatif, dan teknologi digital dipandang sebagai salah satu jawabannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana kebijakan digital telah diimplementasikan, mengidentifikasi tantangan dan peluang, serta merumuskan rekomendasi kebijakan yang efektif. Menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus, penelitian ini mengumpulkan data melalui wawancara mendalam dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pejabat pemerintah, agen perekrutan, organisasi masyarakat sipil, dan pekerja migran purna. Analisis dokumen dan observasi lapangan juga dilakukan untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun inisiatif digital seperti Sistem Informasi Terpadu Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (SiskotkIn) telah ada, implementasinya masih menghadapi kendala signifikan. Pemanfaatan teknologi digital masih terfragmentasi dan belum terintegrasi antar lembaga, yang menciptakan inefisiensi dan celah untuk praktik ilegal. Selain itu, kesenjangan digital yang parah, terutama di daerah pedesaan, menjadi hambatan utama bagi pekerja migran untuk mengakses informasi dan layanan resmi secara mandiri. Hal ini diperparah oleh kurangnya literasi digital di kalangan pekerja migran dan kapasitas SDM yang belum memadai. Penelitian ini menyimpulkan bahwa untuk mencapai tata kelola migrasi yang aman dan efektif, tidak cukup hanya menyediakan teknologi, tetapi juga diperlukan integrasi sistem data, peningkatan literasi digital, dan penguatan kemitraan strategis antara pemerintah, swasta, dan masyarakat sipil. Rekomendasi ini diharapkan dapat menjadi panduan praktis bagi pembuat kebijakan untuk mewujudkan ekosistem migrasi yang lebih transparan dan berpihak pada pekerja migran.

Kata Kunci: Migrasi; Kebijakan Digital; Pemanfaatan Teknologi; Tata Kelola Migrasi; Nusa Tenggara Barat (NTB)

MIGRATION AND DIGITAL POLICY: UTILIZATION OF TECHNOLOGY IN MIGRATION GOVERNANCE IN WEST NUSA TENGGARA

Abstract: This research examines the utilization of digital technology in migration governance in West Nusa Tenggara Province (NTB), a region with a high rate of labor migration. Complex issues such as human trafficking and labor exploitation necessitate innovative solutions, and digital technology is viewed as one of the answers. This study aims to analyze the extent to which digital policies have been implemented, identify challenges and opportunities, and formulate effective policy recommendations. Using a qualitative method with a case study approach, the research collected data through in-depth interviews with various stakeholders, including government officials, recruitment agencies, civil society organizations, and returning migrant workers. Document analysis and field observations were also conducted to gain a comprehensive understanding. The results indicate that although digital initiatives such as the Integrated Information System for Placement and Protection Services for Indonesian Migrant Workers (Sistem Informasi Terpadu Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia -

Siskotkln) exist, their implementation still faces significant obstacles. The use of digital technology remains fragmented and lacks integration across institutions, which creates inefficiency and loopholes for illegal practices. Furthermore, a severe digital divide, especially in rural areas, is a major barrier for migrant workers to independently access official information and services. This is exacerbated by a lack of digital literacy among migrant workers and inadequate human resource capacity. The research concludes that to achieve safe and effective migration governance, it is not enough to merely provide technology; system data integration, increased digital literacy, and the strengthening of strategic partnerships between the government, private sector, and civil society are also required. These recommendations are expected to serve as a practical guide for policymakers to realize a more transparent and pro-migrant worker ecosystem.

Keywords: Migration; Digital Policy; Utilization of Technology; Migration Governance; West Nusa Tenggara (NTB)

PENDAHULUAN

Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) memiliki peran sentral dan unik dalam peta migrasi tenaga kerja Indonesia. Fenomena migrasi, khususnya ke luar negeri, telah menjadi bagian tak terpisahkan dari denyut nadi sosial dan ekonomi masyarakat NTB selama beberapa dekade. Meskipun secara makro migrasi memberikan kontribusi signifikan dalam bentuk remitansi yang meningkatkan pendapatan daerah dan kesejahteraan keluarga, secara mikro, proses ini sering kali diwarnai oleh berbagai tantangan dan risiko yang kompleks. Isu-isu seperti perdagangan manusia, eksploitasi tenaga kerja, penipuan, dan kurangnya perlindungan hukum bagi pekerja migran terus-menerus muncul sebagai masalah krusial yang memerlukan penanganan serius dan inovatif.

Tata kelola migrasi yang ada saat ini, meskipun telah mengalami perbaikan, masih sering bersifat konvensional, manual, dan terfragmentasi. Alur birokrasi yang panjang dan berbelit, kurangnya transparansi informasi, serta koordinasi yang lemah antarlembaga menjadi hambatan utama dalam menciptakan sistem migrasi yang aman dan humanis. Akibatnya, banyak calon pekerja migran, terutama yang berasal dari daerah pedesaan, menjadi rentan terhadap praktik calo ilegal dan pihak-pihak tidak bertanggung jawab. Mereka sering kali tidak mendapatkan informasi yang memadai mengenai hak-hak mereka, kondisi kerja, dan risiko yang mungkin dihadapi di negara tujuan, yang berujung pada kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia.

Di tengah kompleksitas permasalahan ini, era Revolusi Industri 4.0 dan kemajuan teknologi digital menawarkan sebuah paradigma baru dalam tata kelola pemerintahan. Teknologi digital, dengan kemampuannya memproses dan mendistribusikan informasi secara cepat, efisien, dan transparan, berpotensi besar untuk menjadi solusi transformatif. Pemanfaatan teknologi digital dapat mengintegrasikan data, memotong rantai birokrasi yang panjang, meningkatkan akuntabilitas, dan memberdayakan pekerja migran dengan akses informasi yang lebih baik.

Namun, adopsi teknologi digital di sektor publik, khususnya dalam tata kelola migrasi, bukanlah tanpa tantangan. Kesenjangan digital yang nyata antara daerah perkotaan dan pedesaan, rendahnya literasi digital di kalangan masyarakat, dan keterbatasan infrastruktur menjadi hambatan utama. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi sangat penting dan mendesak. Penelitian ini bertujuan untuk tidak hanya menganalisis seberapa jauh teknologi digital telah dimanfaatkan dalam tata kelola migrasi di NTB, tetapi juga untuk mengidentifikasi secara mendalam tantangan-

tantangan yang dihadapi dan merumuskan model kebijakan digital yang efektif, inklusif, dan berkelanjutan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam mewujudkan migrasi yang aman, teratur, dan bermanfaat bagi seluruh pihak, terutama bagi para pekerja migran itu sendiri.

Secara historis, NTB telah lama menjadi salah satu "kantong" pekerja migran terbesar di Indonesia. Data dari Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) menunjukkan bahwa setiap tahunnya ribuan warga NTB berangkat ke berbagai negara, terutama di Asia Timur Tengah dan Asia Tenggara, untuk bekerja di sektor informal seperti asisten rumah tangga atau di sektor formal seperti konstruksi dan manufaktur. Fenomena ini telah menciptakan ketergantungan ekonomi yang signifikan. Remitansi (kiriman uang dari pekerja migran) menjadi salah satu sumber pendapatan terbesar bagi banyak keluarga, yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar, biaya pendidikan, bahkan untuk memulai usaha kecil.

Namun, di balik narasi kesuksesan ekonomi ini, terdapat sisi gelap yang sering kali terabaikan. Banyak calon pekerja migran yang merupakan lulusan sekolah menengah pertama atau bahkan tidak lulus SD. Mereka seringkali memiliki akses informasi yang sangat terbatas dan kurangnya pemahaman mengenai prosedur resmi dan risiko migrasi. Kondisi ini membuat mereka sangat rentan terhadap penipuan oleh oknum calo yang tidak berizin, yang sering menjanjikan pekerjaan dengan upah tinggi namun pada kenyataannya mereka dieksploitasi. Kasus-kasus penempatan ilegal, dokumen palsu, dan pelanggaran kontrak kerja masih sering dilaporkan, menunjukkan bahwa sistem perlindungan yang ada belum sepenuhnya efektif.

Sistem tata kelola migrasi yang diterapkan oleh pemerintah, meskipun telah diatur dalam undang-undang, masih memiliki celah yang besar. Proses pendaftaran yang manual, verifikasi dokumen yang memakan waktu, dan kurangnya integrasi data antar lembaga menjadi masalah utama. Calon pekerja migran harus berpindah dari satu instansi ke instansi lain, seperti Dinas Tenaga Kerja, BP2MI, hingga Imigrasi, yang seringkali memakan waktu, biaya, dan tenaga. Prosedur yang berbelit ini justru mendorong mereka untuk mencari jalan pintas melalui jalur tidak resmi, yang seringkali berakhir dengan kerugian. Selain itu, transparansi informasi masih menjadi isu kritis. Data mengenai P3MI yang berizin, daftar pekerjaan yang valid, dan hak-hak pekerja sering kali tidak mudah diakses oleh masyarakat umum. Akibatnya, mereka tidak memiliki alat untuk memverifikasi keabsahan informasi yang diberikan oleh calo atau agen. Kurangnya transparansi ini juga mempersulit pengawasan oleh pemerintah dan masyarakat sipil.

METODE PENELITIAN

Pendekatan kualitatif digunakan untuk menggali makna, pengalaman, dan persepsi dari para aktor yang terlibat dalam proses migrasi. Berbeda dengan pendekatan kuantitatif yang berfokus pada pengukuran dan statistik, pendekatan kualitatif memungkinkan kami untuk memahami mengapa dan bagaimana inisiatif digital diimplementasikan, serta tantangan yang muncul di lapangan dari sudut pandang manusiawi. Desain studi kasus dipilih karena penelitian ini berfokus pada sebuah unit analisis yang spesifik dan terikat secara kontekstual, yaitu tata kelola migrasi di Provinsi NTB. Dengan studi kasus, kami dapat meneliti fenomena ini secara holistik, mengintegrasikan berbagai sumber data untuk membangun narasi yang kaya dan terperinci. Ini memungkinkan kami untuk tidak hanya mendeskripsikan apa yang terjadi, tetapi juga menjelaskan dinamika yang mendasarinya.

Lokasi penelitian berpusat di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), yang dipilih karena reputasinya sebagai salah satu daerah dengan tingkat migrasi tenaga kerja tertinggi di Indonesia. Penelitian dilakukan di beberapa lokasi kunci, termasuk kantor-kantor dinas pemerintah terkait di ibu kota provinsi (Mataram), serta di beberapa kantong migran di daerah pedesaan untuk mendapatkan perspektif dari para pekerja migran. Pelaksanaan penelitian berlangsung selama tujuh bulan, dimulai dari tahap persiapan hingga penyusunan laporan akhir. Periode ini mencakup studi literatur, perizinan, pengumpulan data lapangan, analisis data, dan penulisan laporan.

Data dikumpulkan dari berbagai sumber untuk memastikan triangulasi, yaitu penggunaan beberapa metode untuk mengkonfirmasi temuan yang sama. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi wawancara mendalam menjadi metode utama untuk mendapatkan data primer. Teknik ini memungkinkan kami untuk menggali informasi secara rinci dan mendapatkan pemahaman yang mendalam dari perspektif narasumber. Wawancara dilakukan dengan narasumber kunci (key informants) dari empat kelompok utama:

- Pemerintah: Pejabat dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans), Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Provinsi NTB, dan Kantor Imigrasi. Wawancara dengan mereka berfokus pada kebijakan yang ada, alur kerja, dan inisiatif digital yang telah diimplementasikan.

- Swasta: Perwakilan dari Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI). Mereka memberikan wawasan tentang praktik perekrutan, penggunaan sistem digital, dan tantangan yang dihadapi dalam koordinasi dengan pemerintah.

- Organisasi Masyarakat Sipil (LSM): Perwakilan dari LSM yang bergerak dalam isu migrasi. Mereka memberikan perspektif tentang celah dalam sistem perlindungan dan tantangan yang dihadapi pekerja migran di lapangan.

- Pekerja Migran Purna (Returnees): Wawancara dengan pekerja migran yang telah kembali memberikan gambaran langsung tentang pengalaman mereka dengan sistem tata kelola migrasi, baik manual maupun digital. Perspektif mereka sangat penting untuk memahami apakah teknologi yang ada benar-benar ramah pengguna dan efektif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kemajuan teknologi digital menawarkan solusi yang menjanjikan untuk mengatasi tantangan-tantangan di atas. Implementasi kebijakan digital (digital policy) dapat mengubah tata kelola migrasi menjadi lebih efisien dan transparan. Berikut adalah beberapa potensi utama:

1. Integrasi Data dan Pelayanan Satu Pintu: Platform digital dapat mengintegrasikan semua data dan layanan yang terkait dengan migrasi ke dalam satu sistem terpadu. Hal ini memungkinkan calon pekerja migran untuk mengurus semua dokumen dari satu tempat, memangkas birokrasi, dan mencegah duplikasi data.
2. Transparansi Informasi: Sistem digital dapat menyediakan akses informasi yang mudah dan real-time kepada masyarakat. Melalui aplikasi atau situs web, calon pekerja migran dapat memeriksa status P3MI, kontrak kerja, dan prosedur resmi secara mandiri. Ini akan mengurangi ketergantungan pada perantara dan meminimalisir risiko penipuan.

3. Sistem Perlindungan yang Lebih Efektif: Teknologi digital dapat digunakan untuk sistem pelacakan dan pengawasan. Melalui aplikasi seluler, pekerja migran dapat melaporkan kasus darurat atau pelanggaran hak secara langsung kepada pihak berwenang. Hal ini mempercepat respons dan meningkatkan perlindungan.
4. Pemberdayaan Pekerja Migran: Dengan akses informasi yang lebih baik dan pelatihan literasi digital, pekerja migran dapat menjadi lebih berdaya. Mereka dapat membuat keputusan yang lebih informatif, mengelola keuangan mereka, dan menjaga komunikasi dengan keluarga.

Penelitian ini sangat relevan dan mendesak karena beberapa alasan. Pertama, ia menawarkan solusi inovatif berbasis teknologi untuk mengatasi masalah migrasi yang telah berlarut-larut. Kedua, hasilnya dapat menjadi landasan bagi pemerintah daerah dan pusat untuk merumuskan kebijakan yang lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan zaman. Dengan sistem yang lebih transparan dan efisien, risiko eksploitasi dan perdagangan manusia dapat berkurang secara signifikan, secara langsung berkontribusi pada upaya perlindungan hak-hak pekerja migran. Terakhir, penelitian ini akan mengisi celah literatur mengenai implementasi kebijakan digital di sektor migrasi, terutama dalam konteks daerah-daerah kantong migran di Indonesia.

Penelitian ini tidak hanya sekadar deskriptif, tetapi juga preskriptif dan proaktif, dengan tujuan akhir untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan yang konkret, praktis, dan dapat diimplementasikan. Dengan menganalisis secara mendalam hubungan antara migrasi dan kebijakan digital di NTB, penelitian ini bertekad untuk menjadi katalisator perubahan positif dan berkelanjutan dalam tata kelola migrasi di masa depan. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut: Bagaimana pemanfaatan teknologi digital saat ini dalam tata kelola migrasi di Provinsi NTB? Dan bagaimana teknologi digital dapat secara efektif diterapkan untuk meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan pekerja migran di NTB?

Secara spesifik, penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut: (a) Menganalisis tingkat implementasi dan pemanfaatan teknologi digital dalam proses tata kelola migrasi oleh pemerintah dan pemangku kepentingan terkait di NTB; (b) Mengidentifikasi tantangan dan peluang dalam penerapan kebijakan digital, termasuk isu kesenjangan digital dan kapasitas sumber daya manusia; (c) Merumuskan rekomendasi kebijakan yang konkret dan praktis untuk mengoptimalkan penggunaan teknologi digital demi perbaikan tata kelola migrasi yang lebih aman, efisien, dan humanis.

Migrasi, dalam konteks sosial, ekonomi, dan politik, adalah pergerakan individu atau kelompok melintasi batas-batas geografis dengan tujuan menetap di tempat baru, baik secara permanen maupun sementara. Dalam konteks tenaga kerja, migrasi seringkali didorong oleh faktor 'push-pull': faktor pendorong dari negara asal (seperti kemiskinan, kurangnya lapangan kerja) dan faktor penarik dari negara tujuan (seperti upah yang lebih tinggi, peluang kerja). Teori ini, meskipun sederhana, masih relevan untuk memahami mengapa individu memilih untuk bermigrasi. Namun, realitas migrasi modern jauh lebih kompleks, melibatkan jaringan sosial, kebijakan pemerintah, dan peran perantara.

Tata kelola migrasi (*migration governance*) mengacu pada kerangka kebijakan, hukum, dan institusional yang mengatur pergerakan manusia. Tujuannya adalah untuk memastikan migrasi berlangsung secara aman, teratur, dan humanis. Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM) mendefinisikan tata kelola migrasi yang baik sebagai sistem yang mencerminkan komitmen terhadap perlindungan hak-hak migran dan kesejahteraan sosial. Namun, dalam praktiknya, tata kelola migrasi sering menghadapi

tantangan, terutama di negara-negara berkembang seperti Indonesia, di mana sistem administrasi masih bersifat manual, terfragmentasi, dan rentan terhadap korupsi. Kelemahan ini membuka celah bagi praktik ilegal seperti perdagangan manusia dan penyelundupan migran.

Kebijakan digital (*digital policy*) adalah serangkaian aturan, regulasi, dan strategi yang dirancang oleh pemerintah untuk memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam mencapai tujuan-tujuan publik. Dalam konteks pemerintahan, kebijakan digital mengacu pada konsep *e-government* dan tata kelola digital (*digital governance*). Tujuannya adalah untuk meningkatkan efisiensi layanan publik, transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi warga. Menurut OECD (2019), tata kelola digital yang efektif harus mencakup integrasi data, penggunaan analitik, dan desain layanan yang berpusat pada pengguna (*user-centric*).

Dalam konteks migrasi, kebijakan digital dapat diterapkan pada berbagai tahapan: dari pendaftaran dan verifikasi calon pekerja migran, penyediaan informasi dan pelatihan, hingga pelacakan dan perlindungan di negara tujuan. Platform digital dapat memotong rantai birokrasi, menyediakan akses informasi yang merata, dan memungkinkan pengawasan yang lebih baik. Namun, keberhasilan implementasi ini sangat bergantung pada faktor lain, termasuk kesiapan infrastruktur, kapasitas sumber daya manusia (SDM), dan yang paling penting, bagaimana kebijakan tersebut dikomunikasikan dan diadopsi oleh pengguna akhir.

Kesenjangan digital (*digital divide*) merujuk pada ketidaksetaraan dalam akses, penggunaan, dan dampak TIK antara individu, rumah tangga, bisnis, dan area geografis. Konsep ini tidak hanya terbatas pada ketersediaan perangkat (misalnya, *smartphone*) dan konektivitas internet, tetapi juga mencakup kesenjangan dalam literasi digital (kemampuan menggunakan TIK secara efektif) dan akses terhadap konten yang relevan. Dalam konteks migrasi, kesenjangan digital sangat relevan. Pekerja migran yang berasal dari daerah pedesaan, seperti di NTB, sering kali menjadi korban dari kesenjangan ini. Meskipun mereka mungkin memiliki perangkat, mereka tidak memiliki pengetahuan atau akses untuk menggunakannya demi mendapatkan informasi yang sah, sehingga tetap rentan terhadap penipuan. Kesenjangan ini menciptakan hambatan sosial dan ekonomi yang signifikan, memperburuk ketidaksetaraan yang sudah ada.

Beberapa penelitian telah mengkaji hubungan antara teknologi dan migrasi, tetapi sebagian besar berfokus pada peran media sosial atau dampak TIK terhadap kehidupan migran, bukan pada tata kelola migrasi oleh pemerintah. Studi tentang Peran Media Sosial: Penelitian oleh Gillespie et al. (2018) dan Dekker (2019) menyoroti bagaimana pekerja migran menggunakan media sosial untuk membangun jaringan, mencari pekerjaan, dan berbagi informasi. Studi-studi ini menunjukkan bahwa media sosial menjadi alat vital bagi migran untuk bertahan hidup. Namun, mereka tidak secara spesifik menganalisis bagaimana pemerintah memanfaatkan teknologi ini dalam kerangka kebijakan resmi. Penelitian ini akan mengisi celah tersebut dengan fokus pada implementasi kebijakan digital dari sisi pemerintah, bukan dari perspektif individu.

Kajian *E-Government* dan Layanan Publik: Banyak penelitian tentang *e-government* (misalnya, Setyanto & Widjaja, 2017) mengkaji implementasi TIK dalam pelayanan publik secara umum. Mereka sering kali menyoroti tantangan birokrasi, kapasitas SDM, dan anggaran. Namun, studi-studi ini jarang menghususkan diri pada isu-isu unik dan kompleks yang terkait dengan migrasi, seperti perlindungan hak-hak pekerja migran atau penanganan kasus ilegal. Penelitian ini akan mengambil temuan dari studi-studi tersebut dan menerapkannya secara spesifik pada konteks tata kelola migrasi,

memberikan pemahaman yang lebih terperinci. Penelitian tentang Migrasi di NTB: Beberapa studi (misalnya, Rahman & Suryani, 2019) telah mengkaji isu-isu migrasi di NTB dari sudut pandang sosial dan ekonomi. Mereka mendokumentasikan dampak remitansi dan tantangan yang dihadapi pekerja migran. Namun, penelitian-penelitian ini umumnya tidak memasukkan dimensi teknologi digital sebagai variabel utama.

Penelitian ini bertujuan untuk mengisi tiga celah utama yang ditemukan dari ulasan Pustaka. Fokus pada Keterkaitan: Penelitian ini secara khusus berfokus pada keterkaitan antara kebijakan digital dan tata kelola migrasi. Mayoritas studi terdahulu cenderung memisahkan kedua isu ini. Analisis Implementasi dari Sisi Aktor: Penelitian ini akan menganalisis implementasi kebijakan digital dari perspektif berbagai aktor yang terlibat—pemerintah, swasta, masyarakat sipil, dan pekerja migran—bukan hanya dari perspektif teoretis atau pemerintah saja. Konteks Spesifik Lokal: Dengan studi kasus di NTB, penelitian ini memberikan analisis mendalam tentang bagaimana teori dan kebijakan digital berinteraksi dengan realitas sosial, ekonomi, dan geografis di tingkat lokal. Dengan mengintegrasikan konsep-konsep kunci dan mengisi celah penelitian yang ada, studi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan, baik secara akademis maupun praktis, dalam memajukan tata kelola migrasi yang lebih efektif dan humanis melalui pemanfaatan teknologi digital.

Implementasi Teknologi yang Terfragmentasi

Penelitian ini menemukan bahwa meskipun pemerintah telah mengadopsi berbagai inisiatif digital, implementasinya masih terfragmentasi dan belum terintegrasi secara menyeluruh. Inisiatif digital utama yang ditemukan di lapangan adalah Sistem Informasi Terpadu Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (SiskotkIn) yang dikelola oleh Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI). Sistem ini dirancang untuk mendata dan memproses keberangkatan pekerja migran. Namun, berdasarkan wawancara dengan P3MI (Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia), sistem ini seringkali tidak sinkron dengan sistem yang digunakan oleh instansi lain, seperti Imigrasi dan Dinas Tenaga Kerja.

Seorang perwakilan dari P3MI menyatakan, "Kami harus memasukkan data yang sama berkali-kali ke beberapa sistem yang berbeda. Kadang data di SiskotkIn tidak langsung terbaca di sistem Imigrasi. Ini membuat prosesnya lama dan tidak efisien." Keterbatasan ini memaksa P3MI untuk tetap mengandalkan dokumen manual, menciptakan duplikasi data dan menghambat transparansi. Observasi lapangan juga menunjukkan tumpukan berkas fisik di loket-loket pelayanan, yang mengindikasikan bahwa proses digital masih belum sepenuhnya menggantikan alur kerja konvensional. Kondisi ini bertolak belakang dengan konsep tata kelola digital yang ideal, yang menekankan pada integrasi dan interoperabilitas sistem untuk menciptakan pelayanan satu pintu (one-stop service).

Kesenjangan Digital dan Dampaknya

Salah satu temuan paling signifikan adalah adanya kesenjangan digital yang nyata, terutama antara pekerja migran yang berasal dari perkotaan dan pedesaan. Kesenjangan ini tidak hanya pada akses terhadap perangkat atau internet, tetapi juga pada tingkat literasi digital. Wawancara dengan pekerja migran purna menunjukkan bahwa sebagian besar dari mereka, terutama yang berasal dari daerah terpencil, tidak pernah menggunakan aplikasi resmi pemerintah. Mereka mendapatkan informasi dari mulut ke mulut atau dari calo yang tidak berizin.

Seorang pekerja migran purna dari Lombok Timur menceritakan, "Saya tidak tahu ada aplikasi pemerintah. Kami hanya ikut saja apa kata agen. Waktu itu tidak ada sinyal internet di desa saya, jadi percuma juga walaupun ada." Hal ini sejalan dengan teori kesenjangan digital yang tidak hanya tentang infrastruktur, tetapi juga tentang keterampilan. Walaupun pemerintah gencar mendorong penggunaan teknologi, rendahnya literasi digital di kalangan calon pengguna akhir membuat inisiatif ini tidak efektif. Dampaknya, pekerja migran yang paling rentan justru tidak terjangkau oleh sistem digital, yang seharusnya dirancang untuk melindungi mereka. Mereka menjadi target empuk bagi calo dan pihak-pihak tidak bertanggung jawab yang menjanjikan kemudahan proses di luar jalur resmi.

Tantangan Koordinasi Antar Lembaga

Tantangan lain yang muncul adalah kurangnya koordinasi dan komunikasi antarlembaga yang terlibat dalam tata kelola migrasi. Wawancara dengan pejabat pemerintah dari BP2MI dan Disnakertrans menunjukkan adanya tumpang tindih kewenangan dan perbedaan prosedur. Masing-masing instansi memiliki sistem dan datanya sendiri, dan pertukaran informasi seringkali berjalan lambat dan tidak efisien.

Seorang pejabat Disnakertrans mengungkapkan, "Kami bekerja sesuai tugas pokok dan fungsi kami, tapi seringkali ada informasi yang tidak sinkron dari instansi lain. Ini menghambat proses verifikasi dan penanganan kasus." Kurangnya koordinasi ini menciptakan kebingungan di kalangan pekerja migran dan P3MI, memperpanjang waktu tunggu dan membuka peluang untuk penyalahgunaan sistem. Temuan ini menegaskan kembali bahwa keberhasilan tata kelola digital tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga pada kerangka kelembagaan yang kuat dan terintegrasi.

Analisis Implementasi Berdasarkan Teori Tata Kelola Digital

Temuan tentang implementasi yang terfragmentasi secara langsung berhubungan dengan konsep tata kelola digital yang ideal. Menurut OECD (2019), tata kelola digital yang efektif mensyaratkan integrasi data dan interoperabilitas sistem. Namun, di NTB, sistem yang ada masih berdiri sendiri (siloeed systems), gagal menciptakan ekosistem digital yang kohesif. Kurangnya integrasi ini bukan hanya masalah teknis, tetapi juga masalah kelembagaan. Masing-masing instansi cenderung mempertahankan data dan sistemnya sendiri, yang mungkin didorong oleh perbedaan anggaran, prosedur, atau bahkan resistensi terhadap perubahan.

Implikasinya, sistem digital yang seharusnya menjadi alat untuk mempercepat pelayanan justru menjadi beban. Pekerja migran dan P3MI terpaksa mengurus dokumen secara manual, mengeliminasi manfaat utama dari digitalisasi. Ini menunjukkan bahwa adopsi teknologi tanpa reformasi kelembagaan yang menyertainya hanya akan menambah kompleksitas, bukan menyelesaikannya.

Kesenjangan Digital sebagai Hambatan Kritis

Temuan tentang kesenjangan digital menegaskan relevansi teori yang dikemukakan oleh para ahli seperti UNESCAP (2018). Kesenjangan ini tidak hanya terletak pada akses fisik ke internet, tetapi juga pada literasi digital, yang merupakan hambatan utama. Teknologi tidak akan berfungsi sebagai alat pemberdayaan jika penggunaannya tidak memiliki kemampuan untuk memanfaatkannya.

Diskusi ini menekankan bahwa solusi berbasis teknologi harus didampingi oleh program-program pembangunan kapasitas. Pemerintah perlu berinvestasi tidak hanya

pada infrastruktur, tetapi juga pada program pelatihan literasi digital yang ditargetkan, terutama di daerah-daerah kantong migran. Jika tidak, inisiatif digital hanya akan menguntungkan sebagian kecil populasi yang sudah memiliki akses dan pengetahuan, sementara kelompok yang paling rentan tetap terpinggirkan. Kesenjangan ini juga menciptakan peluang bagi pihak-pihak ilegal, karena pekerja migran yang tidak melek digital akan selalu mencari perantara yang "lebih mudah" dan "lebih cepat," meskipun berisiko.

Koordinasi sebagai Kunci Keberhasilan

Temuan mengenai kurangnya koordinasi antarlembaga menunjukkan bahwa tata kelola migrasi adalah sebuah ekosistem. Keberhasilan satu bagian tidak menjamin keberhasilan keseluruhan. Teori tata kelola menekankan pentingnya kemitraan dan kolaborasi antara berbagai aktor—pemerintah, swasta, dan masyarakat sipil. Tanpa koordinasi yang kuat, setiap inisiatif akan berjalan sendiri-sendiri, menciptakan tumpang tindih dan kebingungan.

Kelemahan koordinasi ini juga berimplikasi pada akuntabilitas. Jika terjadi kasus pelanggaran, sulit untuk melacak siapa yang bertanggung jawab karena tidak ada sistem terpadu yang mencatat setiap tahapan proses. Oleh karena itu, langkah strategis ke depan tidak hanya harus berfokus pada teknologi, tetapi juga pada pembentukan kerangka kerja sama yang jelas, di mana setiap lembaga memiliki peran dan tanggung jawab yang terintegrasi untuk mencapai tujuan bersama: melindungi pekerja migran.

Hasil dan pembahasan ini memiliki implikasi penting, baik secara teoretis maupun praktis. Secara teoretis, penelitian ini memberikan bukti empiris yang menguatkan argumen bahwa keberhasilan kebijakan digital dalam tata kelola publik tidak hanya bergantung pada aspek teknis, tetapi juga pada faktor kelembagaan, sosial, dan budaya. Secara praktis, temuan ini memberikan panduan konkret bagi pembuat kebijakan di NTB. Untuk mengoptimalkan pemanfaatan teknologi, pemerintah perlu:

- Mengintegrasikan sistem data secara holistik.
- Meningkatkan literasi digital di kalangan pekerja migran melalui program yang mudah diakses.
- Membangun mekanisme koordinasi yang kuat antarlembaga.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berfungsi sebagai dokumentasi masalah, tetapi juga sebagai peta jalan menuju tata kelola migrasi yang lebih modern, efisien, dan humanis.

PENUTUP

Berdasarkan analisis mendalam yang dilakukan, penelitian ini menyimpulkan bahwa jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan adalah sebagai berikut:

1. Pemanfaatan Teknologi Digital Belum Terintegrasi

Pemanfaatan teknologi digital dalam tata kelola migrasi di NTB masih bersifat parsial dan terfragmentasi. Sistem seperti Siskotkln belum terintegrasi secara penuh dengan sistem milik instansi lain seperti Imigrasi dan Dinas Tenaga Kerja. Kondisi ini memaksa para pelaku, seperti P3MI, untuk melakukan input data berulang kali, yang justru menambah inefisiensi dan memperpanjang proses birokrasi. Alih-alih mempermudah, fragmentasi ini menciptakan celah bagi praktik manual yang tidak transparan.

2. Kesenjangan Digital Menjadi Hambatan Utama

Kesenjangan digital bukan hanya masalah infrastruktur, melainkan juga masalah literasi digital. Mayoritas pekerja migran, terutama yang berasal dari daerah pedesaan, memiliki akses terbatas terhadap internet dan kurangnya kemampuan untuk memanfaatkan platform digital resmi. Ini membuat mereka tetap bergantung pada informasi dari mulut ke mulut atau perantara tidak resmi (calo). Akibatnya, teknologi yang seharusnya menjadi alat pemberdayaan justru gagal menjangkau kelompok yang paling membutuhkan perlindungan.

3. Koordinasi sebagai Kunci yang Hilang

Keberhasilan tata kelola migrasi yang berbasis digital sangat bergantung pada koordinasi dan kerja sama antarlembaga. Temuan kami menunjukkan bahwa kurangnya komunikasi dan tumpang tindih kewenangan antar instansi pemerintah telah menghambat pertukaran data yang lancar. Ini memicu kebingungan, memperlambat penanganan kasus, dan mempersulit pengawasan terhadap P3MI. Tanpa koordinasi yang kuat, teknologi secanggih apa pun tidak akan mampu mengatasi masalah kelembagaan yang ada.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tantangan implementasi yang bersifat kelembagaan dan sosial jauh lebih dominan daripada tantangan teknis semata. Potensi digital untuk menciptakan tata kelola migrasi yang lebih aman dan humanis hanya dapat terealisasi jika tantangan-tantangan fundamental ini diatasi.

Berdasarkan kesimpulan dan temuan yang ada, penelitian ini merumuskan saran-saran konkret yang praktis bagi pembuat kebijakan di NTB:

a. Integrasi Sistem Data Terpadu

Pemerintah Provinsi NTB, BP2MI, Disnakertrans, dan instansi terkait lainnya harus segera mengintegrasikan semua sistem data migrasi ke dalam satu platform terpadu. Platform ini harus menjadi sumber informasi tunggal dan real-time bagi semua pihak yang terlibat. Integrasi ini akan menghilangkan duplikasi data, meningkatkan transparansi, dan mempercepat proses administrasi. Sebagai langkah awal, dapat dibentuk tim gugus tugas yang beranggotakan perwakilan dari setiap instansi untuk merancang dan menguji coba sistem terintegrasi ini.

b. Peningkatan Literasi dan Akses Digital

Program peningkatan literasi digital harus menjadi prioritas utama. Pemerintah perlu merancang modul pelatihan yang mudah dipahami, ditujukan khusus bagi calon pekerja migran. Pelatihan ini dapat dilaksanakan di Balai Latihan Kerja (BLK) dan bekerja sama dengan organisasi masyarakat sipil yang memiliki jangkauan hingga ke tingkat desa. Selain itu, pemerintah daerah perlu bekerja sama dengan penyedia layanan telekomunikasi untuk memperluas jangkauan internet yang stabil di daerah-daerah kantong migran.

c. Penguatan Kemitraan dan Kolaborasi

Tata kelola migrasi yang efektif adalah tanggung jawab bersama. Disarankan untuk membentuk forum kemitraan strategis yang melibatkan pemerintah, P3MI, dan LSM. Forum ini harus berfungsi sebagai wadah reguler untuk berbagi informasi, membahas tantangan implementasi, dan merumuskan solusi bersama. Peran LSM sangat penting sebagai jembatan antara pemerintah dan pekerja migran di tingkat akar rumput,

membantu memastikan bahwa suara dan kebutuhan pekerja migran terwakili dalam perumusan kebijakan.

d. Pengembangan Aplikasi Berbasis Pengguna

Sistem digital yang ada perlu dikembangkan ulang dengan pendekatan yang berpusat pada pengguna (user-centric). Aplikasi harus dirancang agar mudah digunakan, menyediakan informasi yang relevan seperti hak-hak pekerja, informasi kontak darurat, dan panduan praktis dalam bahasa yang sederhana. Fitur-fitur tambahan seperti chatbot berbasis kecerdasan buatan dapat dipertimbangkan untuk memberikan respons cepat atas pertanyaan umum.

Melalui implementasi saran-saran ini, pemanfaatan teknologi digital dapat benar-benar menjadi alat yang kuat untuk mewujudkan tata kelola migrasi yang aman, teratur, dan humanis di Provinsi NTB.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrizal. (2018). Permasalahan yang dialami lansia dalam menyesuaikan diri terhadap penguasaan tugas-tugas perkembangannya. *ISLAMIC COUNSELING: Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam*, 2(2).
- Alfani, I. H. D., & Putri, W. D. (2024). Analisis fenomenologi Alfred Schutz: Tradisi takbir keliling Pondok Pesantren Krapyak Yayasan Ali Maksum Yogyakarta. *JISA: Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama*, 7(1), 45–59.
- Ada, Y. R., Musfiroh, M., Priyo, D., & Wiyono, V. H. (2019). Gambaran kemandirian ekonomi pada lansia. *PLACENTUM Jurnal Ilmiah Kesehatan dan Aplikasinya*, 7(2), 16–23.
- Arini, G. A. (2019). Analisis kecenderungan penduduk lanjut usia berpartisipasi dalam pasar kerja di Kota Mataram. *Journal of Economics and Business*, 5(1), 34–50.
- Arsiyah, & Puspitasari, R. B. (2015). Peran pemerintah dalam pemberdayaan lanjut usia di Kabupaten Sidoarjo. *JKMP*, 3(2), 117–240.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat. (2023). *Profil Lansia Provinsi Nusa Tenggara Barat 2023*.
- Djamhari, E. A., Ramdhaningrum, H., Layyindah, A., Chrisnahutama, A., & Prasetya, D. (2020). *Kondisi kesejahteraan lansia dan perlindungan sosial lansia di Indonesia*. Perkumpulan PRAKARSA.
- Fatah, R. A. (2024). Penerapan metode penelitian fenomenologi pada hermeneutika Hans George Gadamer. *JURNAL KOLABORATIF SAINS*, 7(1), 515–524.
- Fujiyama, Z. P., Afnibar, Jemkhairil, & Yanti, F. (2023). Problematika lansia rentan yang bekerja di sektor informal. *TATHWIR Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 14(1), 20–35.
- Habil, R., & Berlianti, B. (2023). Kehidupan ekonomi, sosial, dan kesehatan lansia dalam pengasuhan keluarga di Lingkungan IV Galang Kota. *SOSMANIORA: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 2(1), 108–121.
- Humaedi, S., Wibowo, B., & Raharjo, S. T. (2020). Kelompok rentan dan kebutuhannya (Sebuah kajian hasil pemetaan sosial CSR PT Indonesia Power UPJP Kamojang). *Share: Social Work Jurnal*, 10(1).
- Jane, A., & Abidin, Z. (2020). Produktif di usia lanjut: Studi fenomenologi pada pekerja adiyuswa yang pernah menjalani mobilitas. *Jurnal EMPATI*, 9(5), 431–437.

- Komalasari, M. A., Sayuti, R. H., & Evendi, A. (2023). Praktik agensi perempuan pekerja sektor informal dalam pariwisata di kawasan pesisir Sekotong Barat. *RESIPROKAL: Jurnal Riset Sosiologi Progresif Aktual*, 5(2), 241–254.
- Lestari, P. P., & Afiatin, T. (2019). *Makna kerja pada lansia perempuan yang bekerja sebagai pedagang di pasar* [Tesis, Universitas Gadjah Mada].
- Maidar. (2019). *Realitas pekerja lanjut usia (Studi di Gampong Alur Dua Mas Kecamatan Kota Bahagia Kabupaten Aceh Selatan)* [Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh].
- Maliki, Z. (2012). *Rekonstruksi teori sosial modern*. Gadjah Mada University Press.
- Naimah, Talib, Herawati, S., & Limbengpiyah, F. (2020). Kerentanan kontekstual pekerja informal ekonomi kelautan di Indonesia: Studi kasus kebijakan publik dalam penanganan COVID-19 di DI Aceh dan Sulawesi Utara. Dalam *Ekonomi informal di Indonesia: Tinjauan kritis kebijakan ketenagakerjaan*. Trade Union Rights Centre Indonesia.
- Panjawa, J. L., & Triyanto, J. (2020). Determinan keterlibatan lansia dalam pasar kerja di Kabupaten Sragen. *Jurnal Litbang Sukowati*, 3(2), 82–91.
- Putri, S. N. (2022). Tenaga kerja ekonomi kreatif: Kerentanan dibalik ilusi kebebasan. *Journal of Citizenship*, 1(2), 66–88.
- Putriandini, S., & Irianto, G. (2012). Fenomenologi konvensional dalam implementasi sistem pengendalian internal pada pembiayaan Musyarakah. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 3(1), 134–154.
- Ramdhan Dewantoro, F. (2024). Analisis risiko kerentanan pekerja informal di Indonesia tahun 2022. *Ecodemica: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Bisnis*, 8(1), 9–17.
- Riani, A. D., Wulan, T. R., & Wardiyono, F. (2023). Eksistensi perempuan lanjut usia pengrajin anyaman pandan di Desa Wonorejo Kecamatan Karanganyar Kabupaten Kebumen. *Jurnal Interaksi Sosiologi*, 31–43.
- Supraja, M. (2012). Alfred Schutz: Rekonstruksi teori tindakan Max Weber. *Jurnal Pemikiran Sosiologi*, 1(2), 81–90.
- The SMERU Research Institute. (2020). *Situasi lansia di Indonesia dan akses terhadap program perlindungan sosial: Analisis data sekunder*. TNP2K Sekretariat Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.
- Wita, G., & Mursal, I. F. (2022). Fenomenologi dalam kajian sosial sebuah studi tentang konstruksi makna. *Titian: Jurnal Ilmu Humaniora*, 6(2), 325–338.
- Zulvi, N. I., & Esfandari, D. A. (2021). Studi fenomenologi motif bookstagrammer Indonesia. *eProceedings of Management*, 8(3).